

## Hubungan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan sikap toleransi peserta didik

Tukiran Taniredja, Dhimas Wahyu Pradana, Eko Priyanto

Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Sejarah Artikel: Diterima: 2/11/2020 Disetujui: 2/3/2021</p> <p><b>Kata kunci:</b> Pembelajaran PPKn; Toleransi; Sikap peserta didik</p> <p><b>Keywords:</b> <i>PPKn learning;</i> <i>tolerance;</i> <i>attitudes of students</i></p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan sikap toleransi peserta didik di kelas VIII SMP Bruderan Purwokerto. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode korelasi dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas VIII SMP Bruderan Purwokerto tahun ajaran 2019/2020 yaitu sebanyak 40 peserta didik. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan angket dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan korelasi product momen. Berdasarkan hasil penelitian, pembelajaran PPKn memiliki hubungan dalam mewujudkan sikap toleransi peserta didik. Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat hubungan sebesar 25%. Data tersebut diperoleh karena tujuan pembelajaran, muatan materi, metode, media, dan evaluasi pembelajaran PPKn memiliki muatan kompetensi sikap toleransi yang harus dimiliki peserta didik. Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembangan sikap toleransi peserta didik melalui pembelajaran PPKN.</p>
	<p><b>ABSTRACT</b></p> <p><i>This study aims to analyze the relationship between learning Pancasila Education and Citizenship (PPKn) with the tolerance attitude of students in class VIII of SMP Bruderan Purwokerto. The method used in this study is the correlation method with a quantitative approach. The population in this study were all students of class VIII of SMP Bruderan Purwokerto in the academic year 2019/2020, as many as 40 students. Data collection techniques in this study used a questionnaire and documentation that were analyzed using product-moment correlation. Based on the results of the study, it can be concluded that PPKn learning has a relationship in realizing the tolerance attitude of students. The results of the data analysis show that there is a relationship of 25%. The data was obtained because the learning objectives, material content, methods, media, and evaluation of PPKn learning had a content of the competence of the attitude of tolerance that students must have. This research could be useful as an attitude tolerance development through Pancasila Education and Citizenship learning.</i></p>

### Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang begitu luas yang menjadikannya memiliki kemajemukan di antaranya suku, agama, bahasa, budaya, adat istiadat dan lain sebagainya. Indonesia memiliki ribuan suku dan jenis bahasa yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemajemukan tersebut menjadikan Indonesia kaya baik dalam aspek materiil maupun imateriil sehingga perlu pengelolaan dengan yang baik untuk memaksimalkan potensi tersebut.

Kemajemukan yang terdapat di Indonesia di sisi lain dapat menjadi bumerang bagi bangsa Indonesia sendiri jika tidak dikelola dengan baik. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat - Republik Indonesia (MPR-RI) Nomor V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, pada poin ketiga menyebutkan bahwa “Konflik sosial budaya telah terjadi karena kemajemukan suku, kebudayaan, dan agama yang tidak dikelola dengan baik dan adil oleh pemerintah maupun masyarakat”. Ketetapan MPR-RI tersebut menunjukkan bahwa kemajemukan yang ada dapat mengancam persatuan-kesatuan bangsa dan negara Indonesia jika tidak dimaknai dan dibarengi sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut juga

perlu dibarengi dengan upaya-upaya penyadaran mengenai kemajemukan sebagai usaha mewujudkan masyarakat yang toleran oleh pemerintah dan masyarakat.

Toleransi merupakan salah satu bentuk modal sosial kognitif, merupakan sikap mau menerima dan menghargai perbedaan di lingkungan sekitarnya. Bakar (2015, hal. 123) mengatakan bahwa “toleransi dalam konteks sosial budaya dan agama berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat”. Adanya toleransi dalam masyarakat merupakan jaminan bagi setiap individu dapat segala macam kegiatan secara bebas dan bertanggung jawab dengan tidak melanggar nilai-nilai dan norma di masyarakat. Toleransi bukan hanya karakteristik hubungan sosial antar warga negara (Mummendey & Wenzel, 1999; Van Doorn, 2014), namun juga karakteristik masyarakat atau rezim secara keseluruhan. Pemahaman terbaru tentang toleransi berasal dari teori demokrasi liberal (Gibson, 2006: 22). Toleransi terkait erat dengan norma-norma demokrasi - seperti hak warga negara untuk diperlakukan setara dalam keadaan yang sama; aturan mayoritas dan perlindungan hak minoritas - dan dengan rezim yang menyusun norma-norma ini (Van Doorn, 2014).

Tillman (2004, hal. 36) memberikan definisi toleransi, “*a tolerance reflection point: Tolerance is being open and receptive to the beauty of differences. This universal prespective is important if we wish to create a better world for all*”. Pernyataan Tillman tersebut menggambarkan titik akhir pada toleransi adalah bagaimana manusia secara terbuka dapat saling menerima dan menghormati indahnya perbedaan untuk kedamaian di seluruh dunia.

Teori yang dikembangkan Tillman tentang butir-butir refleksi dari karakter toleransi tersebut adalah kedamaian adalah tujuan; toleransi adalah terbuka dan reseptif pada indahnya perbedaan; toleransi menghargai individu dan perbedaan; toleransi adalah saling menghargai satu sama lain; benih dari intoleransi adalah ketakutan dan ketidakpedulian; benih dari toleransi adalah cinta; jika tidak cinta tidak ada toleransi; yang tahu menghargai kebaikan dalam diri orang lain dan situasi memiliki toleransi; toleransi berarti menghadapi situasi sulit; dan toleransi terhadap ketidaknyamanan hidup dengan membiarkan berlalu, ringan, dan membiarkan orang lain. Temuan studi literatur mengungkap aspek dan indikator karakter toleransi yaitu kedamaian, menghargai perbedaan dan individu, serta kesadaran.

Secara praktis Lickona (2005) memberi pengertian toleransi sebagai sebuah nilai yang sebaiknya diajarkan di sekolah. Toleransi menurut Lickona merupakan bentuk refleksi sikap hormat. Toleransi merupakan sebuah sikap yang memiliki kesetaraan dan tujuan bagi mereka yang memiliki pemikiran, ras, dan keyakinan berbeda-beda yang pada akhirnya toleransi adalah tanda dari salah satu arti kehidupan beradab yang membuat dunia setara dari berbagai bentuk perbedaan.

Definisi yang diberikan oleh Lickona di atas menjadi alasan bahwa mengapa toleransi penting diajarkan hingga pada tahap penerapan dalam kehidupan peserta didik, karena hal tersebut sebagai tanda arti kehidupan yang beradab. Banyaknya pluralitas di Indonesia yang salah satunya adalah aspek agama, toleransi menjadi perhatian penting karena menandakan Indonesia sudah termasuk sebagai bangsa dan negara yang beradab atau belum. Membangun toleransi umat beragama di Indonesia tentu saja memiliki berbagai tantangan untuk dapat mewujudkannya. Apalagi dengan berbagai kasus yang ada, seolah pemerintah menutup mata dan lambat dalam mengambil keputusan untuk menyikapi sikap intoleransi beragama yang semakin marak di Indonesia (Muharram, 2020).

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yang diatur melalui Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia pada pasal 4 ayat (1) menjelaskan “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa penyelenggaraan pendidikan di Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai yang memuat semangat persatuan dan kesatuan di atas kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selain itu pembangunan nasional dari berbagai bidang seharusnya mengacu pada tujuan negara dalam arti *welfare state* mengacu pada Pancasila dan juga UUD 1945 termasuk pada bidang pendidikan dalam proses penentuan kebijakan maupun pada proses transfer pengetahuan (Lestari & Arpanudin, 2020), termasuk di dalamnya pendidikan multikultural sebagai upaya preventif tindakan intoleransi (Chotimah, et.all., 2018) Pendidikan adalah urusan

negara karena pendidikan sangat penting untuk kebahagiaan, kemakmuran, dan kebebasan rakyat, serta menunjukkan bahwa negara itu ada di tengah-tengah warga negara (Aulia & Arpanudin, 2019)

Hal tersebut menjadikan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai salah satu program inti pendidikan baik pada tingkat dasar maupun pendidikan tinggi yang memiliki tugas untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu martabat manusia dan kehidupan bangsa Indonesia yang mampu menjawab tantangan menuju terwujudnya cita-cita nasional. Selain itu terdapatnya ketentuan bahwa PPKn sebagai mata pelajaran yang wajib di berbagai tingkatan yakni pada pasal 37 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 memberi tanda bahwa PPKn memiliki kedudukan penting dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional Indonesia.

Tujuan PPKn sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu menghasilkan kompetensi peserta didik yang memiliki sikap toleransi dalam makna keberagaman dalam bingkai *Bhinneka Tunggal Ika*. Berdasarkan standar isi tersebut artinya PPKn mengemban misi khusus dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Menurut Winataputra dan Budimansyah (2012: 90198) “PPKn merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui koridor *value-based education*”.

PPKn bertujuan melahirkan partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dari warganegara dalam kehidupan politik dan masyarakat baik tingkat lokal maupun nasional. Hal tersebut ditegaskan oleh Wibowo & Wahono (2017, hal. 204) yang mengatakan bahwa, “PPKn di Indonesia memiliki makna filosofis dalam mempersiapkan warga negara yang beradab dan bijaksana”.

Pemerintah memberikan pedoman pelaksanaan pendidikan yang terstruktur dan berjenjang melalui kurikulum. Merujuk pada delapan belas (18) karakter yang hendak diwujudkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, karakter toleransi merupakan salah satu di antaranya. Sehingga harus terdapat kurikulum mata pelajaran yang memiliki muatan toleransi di dalamnya. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam standar isi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 21 tahun 2016, menghendaki peserta didik memiliki sikap toleransi dalam bingkai *Bhinneka Tunggal Ika*. Artinya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran dalam mendidik karakter toleransi peserta didik.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai wahana dalam membentuk karakter sikap toleransi warga negara. Selain sebagai wahana dalam membentuk karakter bangsa, kompetensi kewarganegaraan dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menjadikan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki fungsi wahana dalam mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic knowledge*) dan keterampilan warganegara (*civic skills*). Hal tersebut dapat dilihat dari muatan materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang berisi *Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*. Partisipasi warga negara akan timbul seiring pengetahuan mereka akan hak dan kewajibannya, sehingga *intelektual skill* dan *partisipatoris skill* sebagai bagian dari *civic skill* akan dimiliki oleh warga negara.

Dalam kasus ini sekolah memiliki peran penting dalam menumbuhkan sikap toleransi. Tentunya dalam menumbuhkan sikap demikian dalam pelaksanaan pembelajaran PPKn memiliki tantangan yang berbeda-beda pada setiap sekolah, hal tersebut karena setiap sekolah memiliki latar belakang pluralitas berbeda-beda di kalangan peserta didiknya. Tingkat pluralitas yang berbeda tersebut menjadikan pelaksanaan pembelajaran PPKn di setiap sekolah berbeda-beda dalam rangka menumbuhkan sikap toleransi.

Tantangan tersebut hadir seiring dengan perbedaan latar belakang pada suatu lingkungan belajar (sekolah). Seperti halnya di SMP Bruderan Purwokerto. Sekolah yang berbasis agama Katolik tersebut memiliki kemajemukan dari aspek agama peserta didiknya. Pada tingkatan kelas VIII terbesar yaitu penganut agama Katolik yaitu sejumlah 20 peserta didik dari 40 peserta didik. Artinya hanya 50% dari jumlah peserta didik kelas VIII SMP Bruderan Purwokerto, sisanya mereka beragama Kristen, Islam, Budha, dan Konghuchu.

Penelitian ini berusaha meninjau bagaimana sebenarnya secara mikro dalam lingkungan belajar terdapat sikap toleransi yang timbul dari pembelajaran PPKn. Hipotesis penelitian ini yaitu “terdapat hubungan yang signifikan antara pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dengan sikap toleransi peserta didik di kelas VIII SMP Bruderan Purwokerto tahun ajaran 2019/2020”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai hubungan pembelajaran PPKn dengan sikap toleransi peserta didik di kelas VIII SMP Bruderan Purwokerto tahun ajaran 2019/2020.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasi dengan jenis asosiatif. Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian asosiatif karena rumusan masalah pada penelitian bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel. Secara terinci penelitian ini termasuk asosiatif hubungan simetris. Variabel penelitian ini berupa variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Yang dimaksud variabel bebas (X) di sini yaitu “Pembelajaran PPKn” atau variabel yang mempengaruhi, sedangkan (Y) variabel terikat pada penelitian ini yaitu “Sikap Toleransi” atau variabel yang dipengaruhi.

Sumber data penelitian ini menggunakan data primer dengan teknik pengambilan data kuesioner atau angket. Kuesioner tersebut memiliki alternatif jawaban dengan skala bertingkat dan disebarkan ke seluruh populasi yang berjumlah 40 responden/peserta didik atau seluruh peserta didik kelas VIII SMP Bruderan Purwokerto tahun ajaran 2019/2020. Kuesioner tersebut sebelumnya sudah diuji validitas (Tabel 1) dan reliabilitasnya (Tabel 2). Uji validitas yang dimaksud menggunakan korelasi *product moment* dengan taraf signifikansi 5% dan uji reliabilitas yang dimaksud menggunakan uji Alpha Cronbach.

**Tabel 1**  
Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

Variabel	Jumlah Butir Soal	Jumlah Butir Soal Valid	Jumlah Butir Soal Tidak Valid	Nomor Soal Tidak Valid
X	20	20	0	-
Y	20	15	5	5, 6, 10, 12, 17.

Sumber: Hasil Data Penelitian (2020)

**Tabel 2**  
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

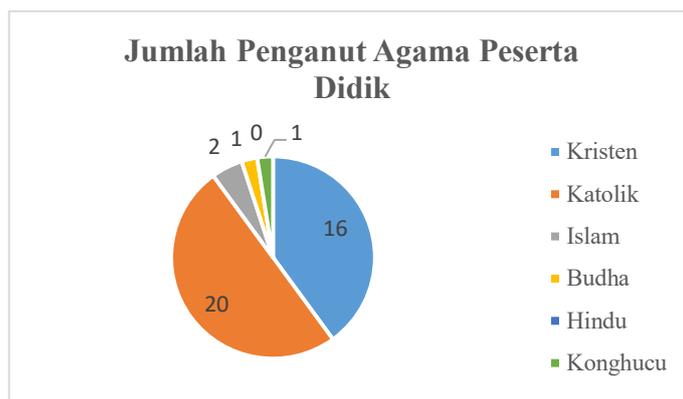
Variabel	<i>Reliability Statistics</i>	
	Cronbach's Alpha	N of Items
X	.957	20
Y	.824	15

Sumber: Hasil Data Penelitian (2020)

Berdasarkan pengujian reliabilitas pada dua variabel di atas, keduanya dinyatakan reliabel sehingga dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. Analisis data penelitian ini menggunakan statistik inferensial dan tergolong data parametrik. Sebelum melakukan uji hipotesis, data yang terkumpul sebelumnya dilakukan uji prasyarat parametrik berupa uji normalitas dan homogenitas. Selain itu untuk mengetahui pengaruh kedua variabel maka dilakukan uji linearitas dan uji regresi linear sederhana. Jika data yang ditemukan sudah memenuhi prasyarat parametrik analisis, kemudian dilakukan uji hipotesis data tersebut menggunakan korelasi *product moment*.

## Hasil dan Pembahasan

Responden dalam penelitian ini berjumlah 40 peserta didik yang merupakan kelas VIII SMP Bruderan Purwokerto. Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dengan guru pengganti sementara mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SMP Bruderan Purwokerto mengatakan bahwa latar belakang peserta didik di SMP Bruderan Purwokerto multi, dalam artian bermacam-macam baik agama, ras, maupun kebudayaan. Paulus Sugeng (7/11/2019), guru Pendidikan Kewarganegaraan SMP Bruderan Purwokerto mengatakan bahwa bisa dikatakan SMP Bruderan Purwokerto adalah gambaran mini tentang kemajemukan di Indonesia. Data penganut agama kelas VIII SMP Bruderan Purwokerto tahun ajaran 2019/2020 ditunjukkan pada Gambar 1.



**Gambar 1**

Jumlah perbedaan penganut agama di kelas VIII SMP Bruderan Purwokerto tahun ajaran 2019/2020

Berdasarkan Gambar 1 dapat dipahami hanya agama Budha saja yang tidak memiliki penganut di VIII SMP Bruderan Purwokerto. Jumlah terbesar yaitu penganut agama Katolik yaitu sejumlah 20 peserta didik dari 40 peserta didik. Artinya hanya 50 persen dari jumlah peserta didik kelas VIII SMP Bruderan Purwokerto.

Hasil analisis data variabel bebas (X) diperoleh skor tertinggi sebesar 93 dan skor terendah sebesar 60 dari skor maksimum 100. Mean (rata-rata) data tersebut sebesar 80,125, modus (nilai yang sering muncul) data tersebut sebesar 87, dan median (nilai tengah) data tersebut sebesar 79, serta dengan Standar Deviasi (SD) sebesar 7,169. Sementara itu pada data temuan variabel terikat (Y) diperoleh skor tertinggi sebesar 75 dan skor terendah sebesar 59 dari skor maksimum 75. Mean (rata-rata) data tersebut sebesar 69,4, modus (nilai yang sering muncul) data tersebut sebesar 75, dan median (nilai tengah) data tersebut sebesar 70, serta dengan Standar Deviasi (SD) sebesar 4,656.

Uji normalitas sebagai uji prasyarat parametrik menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan memanfaatkan nilai residual. *Output* yang dihasilkan yaitu sebesar 0,126 ( $0,126 > 0,05$ ), maka berdasarkan metode pengambilan keputusan data tersebut dikatakan terdistribusi **normal**.

Uji Homogenitas menggunakan analisis uji homogenitas *Analysis of Variance* (ANOVA). *Output* dari uji homogenitas penelitian ini pada tabel ANOVA menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,079 ( $0,079 > 0,05$ ), maka data hasil penelitian ini memiliki varians yang sama (**homogen**).

*Output* dari uji linearitas tersebut mengarah pada ANOVA *Table* yang mana nilai yang digunakan adalah nilai pada bagian signifikansi *Deviation from Linearity*. Hasil dari uji linearitas penelitian ini yaitu dengan nilai signifikansi 0,340 ( $0,340 > 0,05$ ), maka kedua variabel penelitian ini memiliki hubungan yang bersifat **linear**.

Analisis regresi linear sederhana dimaksudkan untuk mencari hubungan satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. *Output* dari uji regresi linear sederhana tersebut mengarah pada

ANOVA *Table* yang mana nilai yang digunakan adalah nilai signifikansi. Hasil dari uji regresi linear sederhana penelitian ini yaitu dengan nilai signifikansi 0,001 ( $0,001 < 0,05$ ), maka kedua variabel penelitian ini memiliki terdapat **hubungan linear** antara Pembelajaran PPKn dengan Sikap Toleransi.

Uji regresi linear sederhana tidak hanya menghasilkan keputusan bahwa data tersebut dapat dikatakan berhubungan secara linear atau tidak, akan tetapi uji ini juga memunculkan nilai koefisien korelasi. *Output* yang dihasilkan dalam uji tersebut menghasilkan koefisien korelasi atau disimbolkan dengan R sebesar 0,500. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan cukup. R *Square* atau koefisien determinasi (KD) yang menunjukkan seberapa bagus model regresi yang dibentuk oleh interaksi variabel bebas dan variabel terikat. Nilai KD yang diperoleh adalah 25% yang dapat ditafsirkan bahwa variabel independen (X) memiliki pengaruh kontribusi sebesar 25% terhadap variabel dependen (Y) dan 75% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel independen (X). Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) (X) dengan variabel Sikap Toleransi (Y) memiliki korelasi/hubungan yang bersifat linear. Koefisien korelasi kedua variabel tersebut diinterpretasikan kategori cukup dengan nilai sebesar 0,500. Kontribusi variabel X terhadap variabel Y sebesar 25%.

Setelah analisis prasyarat parametrik terpenuhi, pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis Pearson korelasi *product* momen Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kedua variabel yaitu antara Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) (X) dengan Sikap Toleransi (Y). Hal tersebut didasarkan pada metode perhitungan korelasi *product moment* yang mana diperoleh koefisien korelasi atau  $r_{hitung}$  sebesar 0,500. Hasil  $r_{hitung}$  tersebut di bandingkan dengan  $r_{tabel}$  pada taraf signifikansi 5% dan responden sebanyak 40 maka didapatkan hasil  $r_{tabel}$  sebesar 0,312. Berdasarkan perbandingan tersebut menunjukkan bahwa  $r_{tabel} > r_{hitung}$  sehingga dapat dikatakan kedua variabel tersebut memiliki korelasi.

Hubungan nilai karakter toleransi dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sendiri tidak hanya sebagai prinsip atau asas penyelenggaraannya saja, akan tetapi juga sebagai standar isi yang harus di penuhi oleh peserta didik sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 21 tahun 2016 yang mana peserta didik dituntut memiliki sikap toleransi dalam bingkai *Bhinneka Tunggal Ika*. Dengan demikian toleransi tidak hanya sebagai materi yang dibelajarkan kepada peserta didik sebagai warga negara untuk menambah *civic knowledge* (pengetahuan warga negara) saja, akan tetapi juga pada aspek lebih jauh, yaitu untuk menumbuhkan *civic disposition* (sikap atau watak warga negara) kepada peserta didik sehingga dapat mencapai tujuan dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) itu sendiri.

Bagian besar yang dimiliki Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam proses menumbuhkan sikap toleransi yang dimiliki peserta didik harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Berkaitan dengan hal tersebut Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) haruslah menjalankan fungsinya dengan maksimal pula. Isep (2013, hal. 14) dalam penelitiannya mendapati bahwa, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai pendidikan multikultural yang mengakui perbedaan individu menghormati persamaan derajat manusia, bekerja sama satu sama lain, mengutamakan kepentingan kelompok lebih daripada individu untuk tujuan kerukunan nasional.

Mata pelajaran PPKn harus dinamis dan mampu menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Salah satu cara yang harus ditempuh yaitu guru harus dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman baik pemahaman materi maupun keterampilan intelektual dan partisipatori dalam kegiatan belajar di lingkungan sekolah.

Dalam pembelajaran PPKn di kelas, guru PPKn dimensi moral mengajar kewarganegaraan cukup menonjol (Althof & Berkowitz, 2006), (Sanger & Osguthorpe, 2013). Misalnya guru merupakan pribadi moral itu sendiri menjadi role model bagi siswa melalui interaksi mereka dengan siswa (Willemse et al., 2015), dan melalui apa yang mereka tekankan ketika mereka mengajar pengetahuan dan keterampilan khusus yang bernilai (Torney-Purta & Barber, 2004), (Willemse et al., 2015). Dengan demikian, maka diperlukan berbagai pendekatan strategi, metode, teknik/taktik, serta dan model belajar dan pembelajaran memerlukan keterpaduan kegiatan intra, ko, dan ekstra kurikuler dalam konstelasi utuh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia.

Profesionalisme guru setidaknya sebagian tergantung pada nilai-nilai, kepercayaan, pengetahuan dan keterampilan pribadi dan profesional yang guru mungkin tidak sepenuhnya sadari (Husu & Tirri, 2007), (Kennedy et al., 2009), (Patterson et al., 2012). Dengan demikian, sering kali guru melakukan kegiatan pembelajaran secara tidak terencana tanpa kompetensi yang memadai (Thornberg, 2008), (Willemse et al., 2015). Maka, untuk mencapai tujuan dari belajar diperlukan strategi pembelajaran merupakan salah satu unsur yang dapat menciptakan kondisi lingkungan belajar bagi siswa.

## Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, terdapat hubungan yang signifikan antara pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dengan sikap toleransi di SMP Bruderan Purwokerto kelas VIII tahun ajaran 2019/2020. Berkaitan dengan hasil uji korelasi didapatkan koefisien korelasi atau  $r$  skor sebesar  $r_{hitung}$  sebesar 0,500 yang mana skor tersebut lebih besar dari  $r_{tabel}$  pada taraf signifikansi 5% dengan  $N$  sebanyak 40 yaitu sebesar 0,312. Dengan demikian dapat dikatakan terdapat korelasi atau hubungan antara pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dengan sikap toleransi di SMP Bruderan Purwokerto kelas VIII tahun ajaran 2019/2020. Hubungan yang dihasilkan kedua variabel yaitu positif dan signifikan karena signifikansi. Hal tersebut ditunjukkan secara praktis oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari dengan menghormati dan menerima perbedaan satu sama lain serta tidak membedakan lingkungan pertemanan. Selain itu karena keberadaan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang menjadi mata pelajaran wajib dan memiliki standar isi berkenaan dengan sikap toleransi dalam bingkai *Bhinneka Tunggal Ika*.

## Referensi

- Althof, W., & Berkowitz, M. W. (2006). Moral education and character education: Their relationship and roles in citizenship education. *Journal of Moral Education*, 35(4), 495–518. doi: [10.1080/03057240601012204](https://doi.org/10.1080/03057240601012204)
- Aulia, S. S., & Arpanudin, I. (2019). Pendidikan kewarganegaraan dalam lingkup sosio-kultural pendidikan non-formal. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 1-12.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Badan Pusat Statistik. (2010). *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bakar, A. (2016). Konsep toleransi dan kebebasan beragama. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 7(2), 123-131.
- Chotimah, U., Alfiandra, A., El Faisal, E., Sulkipani, S., Camelia, C., & Arpanudin, I. (2018). Pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal dalam pendidikan multikultural. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1), 19-25.
- Gibson, J. (2006). Enigmas of Intolerance: Fifty Years after Stouffer's Communism, Conformity, and Civil Liberties. *Perspectives on Politics*, 4(1), 21-34. doi:[10.1017/S153759270606004X](https://doi.org/10.1017/S153759270606004X)
- Husu, J., & Tirri, K. (2007). Developing whole school pedagogical values-A case of going through the ethos of “good schooling.” *Teaching and Teacher Education*, 23(4), 390–401. doi: [10.1016/j.tate.2006.12.015](https://doi.org/10.1016/j.tate.2006.12.015)
- Isep, I. Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum Dalam Mengupayakan Internalisasi Hukum Di Kalangan Peserta Didik. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 13(1). 13-20.
- Kennedy, K. J., Jimenez, S., Mayer, D., Mellor, S., & Smith, J. (2009). Teachers' conversations about civic education: Policy and practice in Australian schools. *Asia Pacific Education Review*, 3(1), 69–

82. doi: [10.1007/bf03024922](https://doi.org/10.1007/bf03024922)

- Lestari, E. Y., & Arpanudin, I. (2020). Refleksi 75 tahun Indonesia merdeka: Dinamika pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 196-205.
- Lickona, T. (2015). *Character matters; persoalan karakter, bagaimana membantu anak mengembangkan penilaian yang baik, integritas dan kebajikan penting lainnya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2012). *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Muharam, R. S. (2020). Membangun toleransi umat beragama di Indonesia berdasarkan konsep Deklarasi Kairo. *Jurnal HAM*, 11(2), 269-283. doi: [10.30641/ham.2020.11.269-283](https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.269-283)
- Mummendey A & Wenzel M (1999) Social discrimination and tolerance in intergroup relations: Reactions to intergroup difference. *Personality and Social Psychology Review*. 3 (2). 158–174.
- Patterson, N., Doppen, F., & Misco, T. (2012). Beyond personally responsible: A study of teacher conceptualizations of citizenship education. *Education, Citizenship and Social Justice*, 7(2), 191–206.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Sikap Toleransi di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Sanger, M. N., & Osguthorpe, R. D. (2013). Modeling as moral education: Documenting, analyzing, and addressing a central belief of preservice teachers. *Teaching and Teacher Education*, 29, 167–176.
- Thornberg, R. (2008). The lack of professional knowledge in values education. *Teaching and Teacher Education*, 24(7), 1791–1798. doi: [10.1016/j.tate.2008.04.004](https://doi.org/10.1016/j.tate.2008.04.004)
- Tillman, Diane G. (2004). *Living Values Education*. Genève, Switzerland: Association for Living Values Education International (ALIVE) Publishing.
- Torney-Purta, J., & Barber, C. (2004). *Democratic school participation and civic attitudes among European adolescents: Analysis of data from the IEA Civic Education Study*. Strasborg: Council of Europe.
- Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (1995). *Resolution*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Record of the General Conference. Diakses pada 16 November 2019 pada pukul 07:19 WIB. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000101803.page=75>.
- van Doorn, M. (2014). The nature of tolerance and the social circumstances in which it emerges. *Current Sociology*, 62(6), 905–927. doi: [10.1177/0011392114537281](https://doi.org/10.1177/0011392114537281)
- Wibowo, A., & Wahono, M. (2017). Pendidikan Kewarganegaraan: Usaha konkret memperkuat multikulturalisme di Indonesia. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 196-205. doi: [10.21831/civics.v14i2.16043](https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16043)
- Wibowo, Arif Prasetyo., Wahono, Margi. (2017). Pendidikan Kewarganegaraan: Usaha konkret untuk Memperkuat Multikulturalisme di Indonesia. *Jurnal Civics*. Vol 14, no. 2, hal. 196-205.
- Willemse, T. M., ten Dam, G., Geijsel, F., van Wessum, L., & Volman, M. (2015). Fostering teachers' professional development for citizenship education. *Teaching and Teacher Education*, 49, 118–127. doi: [10.1016/j.tate.2015.03.008](https://doi.org/10.1016/j.tate.2015.03.008)
- Winataputra, U., & Budimansyah, D. (2012). *Pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif internasional*. Bandung: Widya Aksara Press.